

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintah Republik Indonesia yang berdampak pada perkembangan Akuntansi Sektor Publik yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka akan terbentuknya otonomi bagi suatu pemerintah daerah yang biasa disebut otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat. Dimana pada peraturan Undang-Undang ini merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat dan DPRD). Dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. UU No. 32 tahun 2004 mengalami perubahan menjadi UU No. 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah

Sementara itu pengaturan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004, jika dikaitkan dengan pasal laporan pertanggungjawaban, maka kepala daerah diwajibkan menyampaikan akuntabilitas keuangannya. Hal ini sebagaimana

dinyatakan dimana kepala daerah disamping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektifitas.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur pokok perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*) yang saat ini sedang diupayakan dan dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah dipusat atau pemerintah didaerah dimana pemerintah dituntut untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan sasaran strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Media yang digunakan untuk pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban tersebut yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja (Amri, 2012).

Untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah Penerapan anggaran berbasis kinerja, dalam PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap *input* yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (*line-item & incremental budget*) tetapi berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Hariyadi, 2015). Kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah yaitu Pemanfaatan teknologi informasi. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi baik itu dari karyawan atau fasilitas yang menunjang teknologi informasi di suatu organisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang kini diubah kedalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Kinerja juga berhubungan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh karyawan atau pegawai didalam organisasi pemerintahan tersebut sehingga, semakin tinggi

kinerja pegawai semakin meningkat pula efektifitas, produktifitas dan kualitas pelayanan organisasi tersebut.

Selain itu faktor yang juga diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah komitmen organisasi, dimana komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja pegawai/aparat pemerintah dalam pemerintahan. Sehingga dengan komitmen organisasi yang tinggi menjadikan individu/aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Porter, et.al dalam Darmawan (2013) mendefinisikan komitmen sebagai kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Seorang pegawai/karyawan diharapkan memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan dari organisasi, mempunyai kemauan yang kuat untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai target organisasi, dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Sehingga jika seorang karyawan memegang prinsip atau komitmen organisasi, maka hal ini akan mendorong kinerja organisasi tersebut. Maka disimpulkan bahwa semakin tinggi seorang karyawan memegang komitmen organisasi maka akan semakin tinggi pula kinerja organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang (LAKIP) tahun 2017, Pengukuran Capaian Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang. Hasil evaluasi analisis capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang (LAKIP) tahun 2017 capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang sudah cukup baik dimana realisasinya sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja pemerintah kota Palembang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Kota Palembang

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	B	B	100
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B	100

Sumber : LAKIP Kota Palembang Tahun 2017(2019)

Berdasarkan tabel di atas penilaian LAKIP Kota Palembang menunjukkan hasil yang baik dimana nilai yang didapat sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Tidak hanya berdampak pada penilaian saja hasil dari capaian LAKIP Kota Palembang juga berdampak pada pemerintah kota Palembang yang mendapatkan penghargaan “Terbaik Nasional” dianggap sebagai kota yang berkembang di Indonesia berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2017 (viva.co.id). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang berpengaruh dalam penilaian kinerja di Pemerintah Kota Palembang sehingga mendapatkan penilaian baik dan mendapatkan penghargaan “Terbaik Nasional”.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang mana terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang menggunakan variabel tau faktor yang diduga berpengaruh dalam akuntabilitas kinerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) mengatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amri (2012) mengatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2017) mengatakan bahwa teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang ?
2. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang ?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang ?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas. Maka peneliti membatasi ruang lingkup dengan pembahasan mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja,

pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, dimana objek penelitian dan responden penelitian ini tertuju pada masing-masing OPD yang terdiri dari: 1. Kepala OPD, 2. Kepala Bagian Perencanaan, dan 3. Staf Bagian Keuangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan anggaran berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah baik secara parsial dan juga secara simultan.

2. Bagi pemerintah daerah, sebagai masukan dan gambaran untuk evaluasi program khususnya pada istem penganggaran sektor publik.
3. Bagi lembaga Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.